



Dampak Penutupan Galian C

Ratusan Pekerja Menganggur

GALIAN - Salah satu kondisi galian pasir dan batu di Jembrana.



Mereka kesulitan mencari izin, baik Pemkab maupun Provinsi mengaku tidak memiliki wewenang. Bukan hanya para penyedia jasa penambangan yang terkena dampak tersebut. Akhir tahun ini, rekanan yang hendak menyelesaikan kontrak kerja infrastruktur ikut merasakan imbasnya. Sejumlah pekerja ditemui akhir pekan lalu menyampaikan permasalahan tersebut. Aspirasi itu juga sempat disampaikan ke DPRD.

Ketua Komisi C DPRD Jembrana Ida Bagus Susrama, Rabu (4/11) kemarin membenarkan telah menerima aspirasi terkait permasalahan tersebut dan saat ini masih dibahas oleh DPRD. "Atas instruksi Ketua DPRD, selama sepekan ini kami melakukan konsultasi ke Provinsi dan Karangasem," tandasnya. Para penyedia jasa galian saat ini mengalami kebingungan untuk pengurusan izin. Ada diskresi hukum, dimana merunut UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, diamanatkan khusus perizinan ESDM tambang, galian mineral bukan logam, tambang

bebatuan dari Provinsi.

Sementara saat ini dari provinsi, belum ada lesiapan menerima kewenangan itu. Di sisi lain, UU itu tumpang tindih dengan UU nomor 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi, dimana disebutkan masih menyerahkan kewenangan retribusi untuk pertambangan itu ke Kabupaten/Kota. "Terjadi stagnan aturan saat ini dan menimbulkan benturan di bawah. Sementara pemda menginginkan percepatan pembangunan infrastruktur pada akhir tahun ini," tandasnya.

Sebelumnya, Provinsi mengeluarkan Surat Edaran (SE) Sekda Provinsi Bali yang memberikan kewenangan kabupaten/kota melaksanakan izin yang biasa digunakan dulu. Sebab, saat ini pelaksanaan penyerahan izin di Provinsi itu juga masih menunggu penyerahan P3D (Prasarana, Personel, Pendanaan dan Dokumen) dari Kabupaten/Kota dan diberikan waktu hingga Oktober 2016.

DPRD menurutnya akan memfasilitasi stakeholder mencari

Negara (Bali Post) -

Ditutupnya sejumlah galian C di beberapa wilayah oleh aparat penegak hukum menimbulkan dilema. Di satu sisi, pemerintah dan aparat hukum tegas melakukan penertiban penambangan liar, namun di sisi lain ratusan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor tersebut kini menganggur. Apalagi, kini masih ada kebingungan terkait dasar izin penambangan tersebut.

informasi Dinas PU, seluruh aktivitas penambangan yang didominasi pasir dan batu semuanya ilegal merunut UU 23/2014 dimana kewenangan ada di Provinsi. (kmb26)

solusi permasalahan tersebut.

Rencananya pada Rabu (5/11) hari ini dilakukan rapat kerja (raker) mengundang SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait seperti Kantor Pelayanan

Perizinan Terpadu (KPPT), Dinas PU, Satpol PP serta kepolisian.

Seperti diberitakan sebelumnya, hampir seluruh galian C di Jembrana ditertibkan dan saat ini tidak beroperasi. Dari

Edisi : KAMIS, 5 NOV 2015

Hal : 3



Jatah DAU Rp 982 Miliar Rp 42 Miliar Terserap untuk Gaji Ke-14

Singaraja (Bali Post) -

Setelah ditunggu-tunggu, akhirnya Buleleng mendapatkan jatah Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2016 sebesar Rp 982 miliar. Meski menerima kucuran DAU cukup besar dibandingkan tahun ini, dana tersebut nampaknya belum optimal untuk mendongkrak pembiayaan pembangunan infrastruktur fisik di Buleleng. Pasalnya, Rp 42 miliar dari dana tersebut dialokasikan untuk membayar gaji ke-14 pegawai tahun depan. Tak hanya itu, dana tersebut harus displit lagi Rp 140 miliar atau sebesar 10 persennya untuk seluruh desa di Bali Utara.

Hal itu diungkapkan Bupati Buleleng Agus suradnyana (PAS) didampingi Wakil Bupati Nyoman Sutjidra di sela-sela peninjauan pelaksanaan pemilihan perbekel (pilkel) serentak, Rabu (4/11) siang kemarin. Lebih jauh Bupati PAS mengatakan, sejak awal pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) sokongan DAU dari APBN ini menjadi tumpuan mutlak, agar program lanjutan bidang infrastruktur fisik bisa berjalan optimal. Jika mengandalkan sokongan APBD murni jelas pemerintah daerah akan kesulitan. Apalagi, kebutuhan menyiapkan anggaran dana Pilkada Buleleng 2017 yang menyedot anggaran total Rp 70 miliar. Untuk itu, sokongan DAU dari pemerintah pusat ini diharapkan bisa menjadi solusi terbaik, agar program bidang infrastruktur berjalan maksimal.

Setelah menunggu beberapa pekan, pemerintah pusat akhirnya memastikan kucuran DAU 2016 itu. Buleleng dijatah DAU total Rp 982 miliar. Kucuran dana itu tergolong tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah pusat juga memberikan petunjuk pemanfaatan DAU tersebut. Dari petunjuk pemanfaatan DAU tahun 2016, sepertinya Pemkab belum bisa mengalokasikan DAU secara optimal untuk mendongkrak anggaran di bidang infrastruktur fisik.

Kata Bupati, pemerintah pusat mewajibkan jatah DAU yang diterima tahun depan dialokasikan untuk membayar gaji ke-14 pegawai di daerah. Jumlahnya pun cukup fantastis yakni mencapai Rp 42 miliar. Selain untuk membayar gaji ke-14, DAU ini harus kembali displit untuk dialokasikan kepada seluruh desa di Buleleng jumlah total Rp 140 miliar.

Ketua DPRD Gede Supriatna mengatakan, menyusul kabar pasti kucuran DAU tersebut pemerintah daerah diharapkan tetap mengikuti petunjuk pemanfaatan yang sudah digariskan pemerintah pusat. Sebenarnya, dia sendiri berharap besar kalau kucuran DAU bisa digunakan sebesar-besarnya untuk menambah biaya infrastruktur fisik di daerah. Namun karena pembayaran gaji ke-14 termasuk keharusan menyplit dana desa 10 persen itu juga penting, sehingga hal ini harus diikuti. (kmb38)

Edisi : Komus, 5 NOV 2016

Hal : 4



Meningkat, ✓ Defisit APBD 2016

Denpasar (Bali Post) -

Defisit antara pendapatan dan belanja daerah pada APBD Bali 2016 meningkat dibandingkan rancangan APBD yang diajukan gubernur sebelumnya. Defisit yang awalnya dirancang Rp 266 miliar, kini menjadi Rp 357 miliar. Namun, DPRD Bali yang menetapkan ranperda APBD 2016 menjadi perda tetap optimis defisit ini dapat ditutupi sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun anggaran 2015.

“Ada beberapa program dan kegiatan yang pro-rakyat kami masukkan di *injury time*. Paling besar untuk penyediaan air minum di Nusa Penida sehingga cukup menambah defisit,” ujar Ketua Pansus APBD 2016, I Ketut Kariyasa Adnyana, usai rapat paripurna DPRD Bali, Rabu (4/11) kemarin.

Kariyasa menambahkan, bantuan di Kabupaten Klungkung itu Rp 14 miliar ditambah bantuan untuk pengadaan mesin pompa air di Guyangan Rp 2 miliar. Anggaran lain yang menambah defisit yakni program penyuluh penutur bahasa Bali sebesar Rp 8,1 miliar lebih bagi 716 desa/kelurahan di Bali. Kemudian, tambahan honor bagi PTT bidan sebesar Rp 1,5 miliar lebih bagi 441 orang bidan, jalan alternatif dan lahan parkir di lingkungan Pura Ulun Danu Batur, pembangunan sarana gedung Puskesmas Kediri II sebesar Rp 1,25 miliar, serta hibah kepada MUDP Rp 500 juta, kepada MMDP Rp 900 juta, dan kepada MADP sebesar Rp 2,85 miliar.

“Termasuk kita anggarkan juga untuk bantuan sepeda motor Babinsa Korem sebesar Rp 1,1 miliar dan renovasi asrama Polda Bali sebesar Rp 4,33 miliar. Itu sudah menjadi usulan lama dari Polri minta bantuan. Kalau masih APBD bisa membantu, tidak ada salahnya,” jelasnya. (kmb32)

Edisi : Kamis, 5 Nov 2015

Hal : 2